

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua staf Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar , maka penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan RENSTRA Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RENSTRA Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar memuat program dan kegiatan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Demikian RENSTRA Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Martapura, Januari 2019
Kepala Dinas kominfo, Statistik dan
Persandian
Kabupaten Banjar ,




Dr. Ir. H.M. FARID SOUFIAN ,MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601218 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar.....	7
1. Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar	1
2. Sekretaris Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar.....	1
2.2. Sumber Daya Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar.....	9
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	9
2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar	11
2.3.1. Tantangan dan Peluang	17
BAB III	19
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	19
a. Analisis Lingkungan Internal	19
b. Analisa Lingkungan Eksternal.....	20

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Daerah	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV	26
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN	26
4.1. Visi dan Misi	26
4.2. Tujuan dan Sasaran	28
BAB V	29
STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
BAB VI	32
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	32
BAB VII	36
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	36
Pedoman Transisi	37
BAB VIII	38
PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

...

DAFTAR GAMBAR

.....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Banjar mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Banjar, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Teknokratik Rencana Strategis Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar, termasuk Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah Teknokratik disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Rencana Strategis Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perda Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2015 – 2021 dan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2016-2021 juga disusun mengacu pada batas kewenangan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait baik vertikal maupun horizontal, perencanaan vertikal yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2016-2021 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.
- c. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- d. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar 2016-2021 mengacu pada:

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (13) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah;
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
- (18) Peraturan Bupati Banjar nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar 2016-2021 adalah merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan

visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar juga bertujuan untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar ; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;** Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam perencanaan daerah, serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD;** Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar periode sebelumnya, dan memuat hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar .
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI;** berisi Kondisi Umum Perencanaan Masa Kini dan Kondisi Yang Diinginkan yang memuat identifikasi dan analisa lingkungan strategis, yaitu identifikasi dan analisa lingkungan internal Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar berupa kelemahan dan kekuatan, serta identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Dinas kominfo, Statistik dan

Persandian kabupaten Banjar berupa peluang dan tantangan.

- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN;** berisi Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai dengan 2021.
- BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF;** berisi Indikator Kinerja Utama Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun 2016-2021, menjelaskan program dan kegiatan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar, program lintas SKPD, program lintas kewilayahan yang disertai dengan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD;** indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu memuat kadiah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar ; serta catatan dan harapan Kepala Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 desember 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

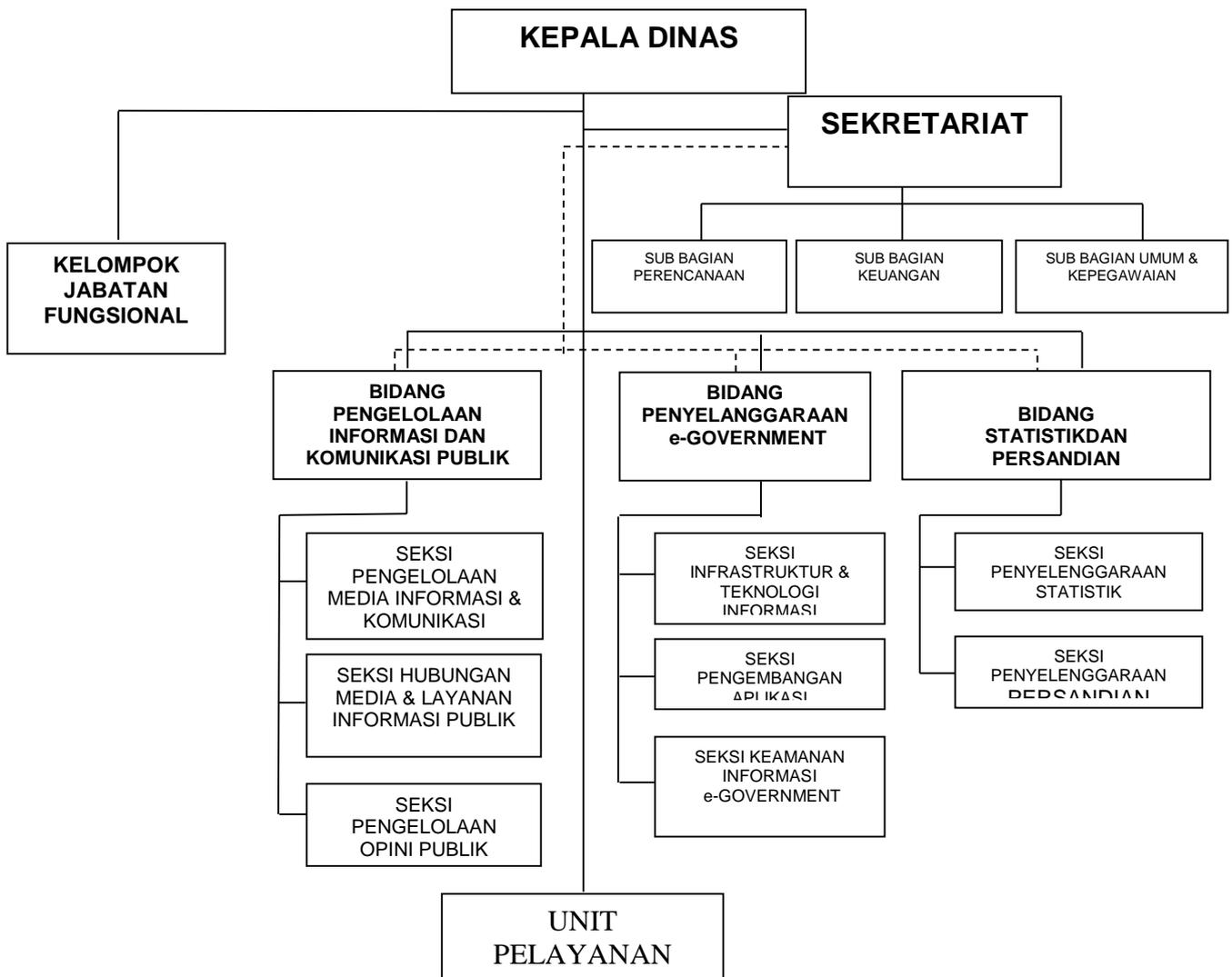
Sedangkan susunan organisasi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan;
 - c. Sub bagian Keuangan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;

- b. Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik;
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - c. Seksi Keamanan Informasi E-Government;
 5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian;
 - a. Seksi Penyelenggaraan Statistik;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Persandian;
 6. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2. 1. Bagan SOTK Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informasi;
- d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretaris Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
- c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan program dan laporan;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian ;
- f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sub Bagian Perencanaan dengan tugas pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan.

Fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
- d. Pengelolaan, Inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
- h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan, dengan tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan.

Fungsi:

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layananan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layananan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layananan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layananan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- d. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layananan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;

- e. Penyelenggaraan teknis urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta Pengelolaan Opini Publik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :

1. **Seksi Pengelolaan Opini Publik**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian Pengumpulan dan Administrasi Data.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. **Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian pengumpulan dan administrasi data.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten;
- c. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik;

- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya

3. Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan Informasi pada bagian Dokumentasi dan Informasi :

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media;
- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government, mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penyelenggaraan e-Government.

Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;

- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- d. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- e. penyelenggaraan teknis urusan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Pengembangan Aplikasi serta Keamanan Informasi e-Government;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi :

1. **Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Diseminasi Informasi pada bagian layanan informasi publik.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan teknologi informasi;
 - b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan teknologi informasi;
 - c. Melaksanakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;
 - f. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang penggunaan infrastruktur dan teknologi informasi;
 - g. Melaksanakan peningkatan SDM di bidang teknologi informasi; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
2. **Seksi Pengembangan Aplikasi** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diseminasi Informasi pada bagian Media Interaktif.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program;

- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program;
- c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi program yang bersifat Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain lembaga dan pelayanan publik untuk kegiatan pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengembangan aplikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

3. **Seksi Keamanan Informasi E-Government**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Diseminasi Informasi pada bagian Media Informasi.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi e-Government;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi e-Government;
- c. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government;
- d. Melaksanakan layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;
- e. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang keamanan informasi e-Government; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

4. **Bidang Statistik dan Persandian** mempunyai tugas: mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur dan ,mengenalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidnag Statistik dan Persandian.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;

- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- d. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- e. penyelenggaraan teknis urusan Penyelenggaraan Statistik dan Penyelenggaraan Persandian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

1. **Seksi Penyelenggaraan Statistik**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Komunikasi Sosial.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
- c. Melaksanakan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. **Seksi Penyelenggaraan Persandian**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian;
- c. Melaksanakan layanan pelaporan persandian kepada Bupati;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai tugas bidang dan tanggungjawabnya.

2.2. Sumber Daya Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia pada Dinas kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar .

Tabel 2. 1. Profil Sumber Daya Manusia Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD
1	Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar		1			1				1							1
2	Sekretaris			1		1					1						1
3	kasubbag perencanaan				1		1					1					1
4	kasubbag bagian keuangan				1		1					1					1
5	kasubbag umum dan kepegawaian				1		1					1					1

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			1			1			1							1
7	Kepala Seksi pengelolaan opini publik				1		1				1						1
8	Kepala seksi pengelolaan media informasi dan komunikasi publik				1		1				1						1
9	Kepala Seksi Hubungan Media Dan Layanan Informasi Publik				1						1						1
10	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government			1		1					1						1
11	Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi				1	1					1						1
12	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi				1		1				1						1
13	Kepala Seksi Keamanan Informasi e-Government				1		1				1						1
14	Kepala Bidang Statistik dan Persandian			1		1					1						1
15	Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik				1	1					1						1
16	Kepala Seksi Penyelenggaraan Persandian				1		1				1						1
17	Pelaksana					1	4	3	1		1	2	1	4	1		9
18	Fungsional (Pranata Komputer)						3	1				2	2				4
	Jumlah		1	4	11	7	16	4	1	2	5	14	3	4	1		30

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan

Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sudah/belum cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2018

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4	6 unit	Baik
2	Kendaraan roda 2	3 unit	Baik
3	Printer	12 unit	Baik
4	Komputer PC	30 unit	Baik
5	Laptop/Notebook	9 unit	Baik
6	Meja Kerja /Meja Rapat	30 unit	Baik
7	Lemari/Filling Kabinet	10 unit	Baik
9	AC	11 unit	Baik
10	Mesin genset	1 unit	Baik
11	Kursi Kerja/Kursi Rapat	20 unit	Baik
12	Microphone Wireless Miic	2 unit	Baik
13	Server	1 unit	Baik
14	LCD Proyektor	3 unit	Baik
15	Kamera Video	4 unit	Baik
16	Drone	1 unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar .

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo,statistic dan Persandian Kabupaten Banjar mendukung seluruh fasilitas antara lain :

- a. Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media baru dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Banjar maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan eGovernment dengan sasaran agar masyarakat

dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.

- b. Layanan *Maintenance*, Penyediaan Jaringan computer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang *life design* atau *life cycle*-nya relatif pendek serta rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala. Layanan pembuatan jaringan LAN dilakukan untuk memberikan perluasan akses internet bagi satuan kerja yang memerlukannya.
- c. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar .

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2011-2015, Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar memberikan pelayanan dalam .

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

NO	Indikator Sasarn	Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Capaian pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	17	71	76.38				80.34	92				113.15	120.51				100
2	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	50	73.73	80				88.23	100				121.31	125.00				100
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	0	100	100				100	100				100	100				100

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Banjar

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Capaian Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Daerah															
Belanja Langsung															
Program Pelayanan Adminisnitrasi Perkantoran															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		18,250,000	3,600,000				18,193,000	3,600,000				99.69	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14,000,000	179,900,000				13,021,587	106,258,059				93.01	59.07		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		4,000,000	30,014,000				4,000,000	28,706,000				100.00	95.64		
Penyediaan Alat Tulis Kantor		22,582,000	30,344,700				22,582,000	25,372,500				100.00	83.61		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14,100,000					12,519,000					88.79		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			46,350,000					46,007,983					99.26		
Penyediaan Makanan dan Minuman		390,096,000	199,584,000				296,782,000	190,140,000				76.08	95.27		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		239,000,000	260,000,000				214,932,127	254,179,044				89.93	97.76		
Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		728,525,001	100,000,000				671,241,504	95,000,000				92.14	95.00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		331,416,800	574,003,700				309,457,300	565,263,700				93.37	98.48		
Pengadaan Mebeleur			39,980,500					39,430,500					98.62		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			119,452,800					119,270,500					99.85		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			72,550,000					59,151,030					81.53		

Uraian 1	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Capaian Anggaran Tahun				
	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	2016 7	2017 8	2018 9	2019 10	2020 11	2016 12	2017 13	2018 14	2019 15	2018 16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		150,200,000	243,916,000				134,175,000	175,126,766				89.33	71.80		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		199,177,999	0				198,645,000	0				99.73	0.00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		38,000,000	10,500,000				37,919,000	8,175,000				99.79	77.86		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		123,000,000	89,200,000				114,905,200	87,506,100				93.42	98.10		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		54,225,000	143,150,000				48,704,500	136,801,370				89.82	95.57		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1,690,000	58,900,000				0	55,547,800				0.00	94.31		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa															
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		775,744,400	5,098,270,200				740,552,950	5,032,195,500				95.46	98.7		
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi		503,584,000	66,940,000				477,345,971	66,317,500				94.79	99.07		
Pengadaan Alat Studio dan komunikasi			386,250,000					367,326,200					95.1		
Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi			360,450,000					325,962,930					90.43		
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi			333,760,000					317,266,998					95.06		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Capaian Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah															
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah		149,995,000	163,675,000				144,815,000	159,374,800				96.55	97.37		
Pengolahan ,updating dan Analisis data dan Statistik daerah		0	144,110,000					141,165,000				0.00	97.96		
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Komunikasi															
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		245,650,000	329,300,000				240,329,555	284,470,680				97.83	86.39		
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi															
Pelatihan SDM dalam Bidang komunikasi dan Informasi			14,000,000					14000000				-	100		
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media															
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		3,126,380,000	203,000,000				3,120,593,660	183,133,409				99.81	90.21		
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		203,800,000	4,051,900,000				197,886,274	3,874,900,918				97.10	95.63		
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat		294,671,600	663,090,000				267,662,378	619,443,513				90.83	93.42		

2.3.1. Tantangan dan Peluang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah.

Tantangan :

1. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan *security system*.
2. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Belum tersedianya pusat data (*data center*) yang tentunya mengakibatkan terciptanya pulau-pulau informasi dengan data yang berbeda antara satu instansi dengan yang lainnya.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Belum meratanya informasi ke pelosok desa karena luasnya wilayah kerja.

Peluang :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik.
3. Reformasi birokrasi dengan *e-Government* mendukung terciptanya *Good Government and Clean Governance*.
4. Mendukung azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas efektivitas dan azas efisiensi serta menciptakan transparansi bagi publik.
5. Meningkatnya jumlah penetrasi komputer di seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Banjar dengan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Tugas Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar melimpahkan pelaksanaannya kepada Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar. Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan proses analisis sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia dari berbagai aspek dan kelemahan yang dapat menghambat proses pembangunan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar selama tahun 2017-2021

1) Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- a) Adanya regulasi sebagai payung hukum Komunikasi dan Informatika;
- b) Kuatnya komitmen Pimpinan Daerah;
- c) Terkoneksikannya jaringan berbasis FO pada semua SKPD di tingkat Kabupaten
- d) Tersedianya program kerja dan kegiatan terstruktur yang didukung dengan komitmen,

disiplin, kreasi dan inovasi *team work* seluruh personil.

- e) Tersedianya ruang *workshop* untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pengembangan kompetensi sumber daya aparatur baik internal dan eksternal.

2) Kelemahan

- a) Belum lengkapnya regulasi formal (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang mendukung dan mengatur penggunaan maupun pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b) Belum memiliki tenaga khusus bidang analisis data dan program yang mendukung kebutuhan seluruh sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta manajemen server.
- c) Terbatasnya tenaga operasional teknis lapangan baik teknisi jaringan maupun aplikasi yang menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan hingga Desa.
- d) Belum tersedianya pusat data (*data center*) yang memadai yang tentunya mengakibatkan terciptanya pulau-pulau informasi dengan data yang berbeda antara satu instansi dengan yang lainnya.

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal ditujukan untuk mengetahui peluang yang tersedia dan kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut analisis lingkungan eksternal :

1) Peluang

- a) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan maupun Keputusan Menteri yang terkait tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- b) Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.
- c) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik.
- d) Reformasi birokrasi dengan *e-Government* mendukung terciptanya *Good Government and Clean Governance*.
- e) Meningkatnya jumlah penetrasi komputer di seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Banjar dengan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f) Adanya dukungan dari Kepala Daerah terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka *e-Government*.
- g) Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*, kemampuan daya saing dan peningkatan fasilitas akses terhadap informasi terkini, kondisi pasar, dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

2) Ancaman

- a) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi

- publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah.
- b) Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem.
 - c) Kurangnya komitmen pimpinan SKPD untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - d) Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di SKPD-SKPD.
 - e) Beberapa SKPD mengembangkan sistem informasi atau aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi lebih dulu sehingga tidak ada keseragaman format data yang mengakibatkan tidak bisa terjadi *sharing* data dengan SKPD lain yang membutuhkan (tidak mendukung interoperabilitas).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2010–2015 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ❖ **Sejahtera;** Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- ❖ **Barokah;** Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dominan pada misi kelima dengan target untuk Meningkatkan pelayanan publik.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Daerah

Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung visi dan misi Kabupaten Banjar yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah dengan cara mengelola seluruh sumber daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi sehingga menciptakan kesatuan sistem yang benar-benar terintegrasi seluruh fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja aparatur yang tentunya dalam upaya mewujudkan kemudahan layanan publik sebagai wujud terselenggaranya *e-Government*.

Dengan demikian renstra Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar terkolerasi dengan Renstra Kementerian/Lembaga atau Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banjar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi termasuk dalam kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yaitu :

1. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya, dengan strategi berupa Peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet;
2. Peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah, dengan strategi sebagai berikut :
 1. Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
 2. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah – wilayah pusat pertumbuhan;
 3. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten.

3. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Renstra Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tidak terkait secara langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang benar dan terintegrasi dalam satu sistem, menciptakan efisiensi anggaran yang akuntabel dan transparan serta mengikis patologi birokrasi.

Pada bidang Komunikasi dan Informatika isu-isu strategis yang muncul antara lain :

- a. Belum terciptanya sinergitas hubungan antar lembaga di bidang informasi, karena menguatnya anggapan bahwa kehumasan bukan kinerja individual akan tetapi kinerja kolektif (organisasi);
- b. Fasilitas sarana kerja utama khususnya main *frame server* sebagian besar sudah saatnya untuk di *recycle* dan diremajakan;
- c. Minimnya peralatan pendukung pada Radio Swara Banjar, sehingga kualitas dan jangkuan siaran relatif terbatas;
- d. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Banjar, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki
- e. Belum semua desa di Kabupaten Banjar terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

4.1. Visi dan Misi

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ❖ **Sejahtera;** Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- ❖ **Barokah;** Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dominan pada **Misi-5 (kelima)** dengan target untuk Meningkatkan Kualitas pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Untuk menjalankan peran penting SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar menetapkan Visi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2016 – 2021 sebagai yaitu

Membangun Masyarakat Informatif yang Sejahtera Dan Barokah

Untuk mewujudkan visi SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan alat yang digunakan, dan alat tersebut adalah misi. Misi adalah alat yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain:

- a. Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi yang up top Date;
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Teknologi Komunikasi dan Informatika;
- c. Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik yang Berkualitas;
- d. Mewujudka Penyelenggaraan Persandian yang Akuntabel;
- e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					KONDISI AKHIR
					2017	2018	2019	2020	2021	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. (Daerah)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	N/A	N/A	2.30	2.50	2.80	2.80
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	0	N/A	N/A	70	91	100	100

BAB V **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

5.1 . Strategi dan Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Banjar. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar menunjukkan bagaimana SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar . Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- c. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
- d. Mengembangkan inovasi TIK
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh SKPD Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi

- b. Kebijakan peningkatan kualitas informasi melalui media baru pada *content* Situs Web Pemerintah Kabupaten Banjar dengan mengutamakan transparansi publik.
- c. Kebijakan optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- d. Kebijakan peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur.
- e. Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah.

Tabel 5. 1. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR Kabupaten Banjar 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a.Peningkatan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b.Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. c.Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. d.Mengembangkan inovasi TIK e.Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi b. Kebijakan peningkatan kualitas informasi melalui media baru pada <i>content</i> Situs Web Pemerintah Kabupaten Banjar dengan mengutamakan transparansi publik. c. Kebijakan optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik. d. Kebijakan peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur. e. Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah.
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.

**Tabel 5. 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten
Banjar**

(disajikan di halaman belakang Renstra)

[Matrix Renstra 2019 New Form.xlsx](#)

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar dominan pada misi 5(Lima): Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang baik, Bersih dan amanah

Indikator Kinerja Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	N/A	2.30	2.50	2.80	2.80
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	N/A	N/A	70	91	100	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI PERHITUNGAN	
1		2		3	
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara indeks Domain dan Bobot domain	1.	(NID Kebijakan Internal dikali 17 %)+(NID Tata kelola dikali 28 %)+(NID Layanan SPBE dikali 55 %)
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1.	Informatif (Zona Hijau) dengan nilai :97-100	1.	Pengembangan website dan Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
		2.	Menuju Informatif (Zona Kuning) dengan nilai : 80-96	2.	Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
		3.	Cukup Informatif (Zona Biru) dengan nilai : 60-79	3.	Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%;
		4.	Kurang Informatif (Zona Merah), dengan nilai : 40-59	4.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.
		5.	Tidak Informatif (Zona Hitam) dengan nilai<39		

Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar ,pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut :

Tabel 6. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar

MISI Pemerintah Kab. Banjar	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Kabupaten Banjar periode 2016-2021 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021.

Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar periode 2016-2021 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Penyusunan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2016-2021 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Banjar setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.